

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Konsep Ruang Publik dalam Studi Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat.<sup>1</sup> Mengutip salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for people*). Artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun, arti istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi pada banyak negara. Demokrasi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut.<sup>2</sup>

Bagi bangsa Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maupun sebagai

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2013, hlm., 273.

<sup>2</sup> Sahya Anggara, Loc. Cit.

mekanisme pembentukan pemerintahan hanya dapat terwujud jika ada jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM. Untuk dapat menjalankan demokrasi sudah pasti harus ada jaminan kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat. Tanpa adanya kebebasan berpendapat, rakyat tidak akan dapat menyampaikan kehendaknya, baik dalam bentuk hak pilih maupun aspirasi untuk dijalankan oleh pemerintahan.<sup>3</sup>

Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR-MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.<sup>4</sup>

Tetapi suatu negara tidak akan dinyatakan demokrasi apabila hanya terjebak pada demokrasi prosedural saja, melainkan harus ada substansi atau esensi dari demokrasi itu sendiri, salah satunya hadirnya kebebasan partisipasi masyarakat di ruang publik. Secara konstitusi Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, justru tidak ada secara gamblang bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, melainkan yang digunakan adalah kedaulatan rakyat/kerakyatan. Meskipun

---

<sup>3</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm., 28-32.

<sup>4</sup> Sahya Anggara, Op. Cit., hlm., 278.

pengertian dari Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lalu mengapa kemudian kedaulatan rakyat bisa dijelaskan sebagai demokrasi? Hal ini tentunya berkaitan antara HAM dan Demokrasi yang berlaku di Indonesia. Karena secara positivis, demokrasi bisa melahirkan kebijakan yang berasal dari rakyat. Antara kedaulatan dan demokrasi, semua warga negara memiliki hak asasi manusianya sendiri/HAM, yaitu memiliki hak dan kebebasan politik. Hak politik disini mencakup hak memilih, dimana dari hak tersebut lahirlah apa yang kita kenal sebagai pemilu; dan hak untuk mempengaruhi, apabila hak kedua ini tidak ada, maka setelah memilih, warga negara akan berubah menjadi budak/patron klien. Karena tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya. Tetapi, kedua hak politik ini tidak akan mempunyai arti apa-apa apabila tidak disertai kebebasan politik. Jadi, kebebasan politik itu adalah alat/sarana untuk dapat melaksanakan hak politik. Karena dari kebebasan ini akan melahirkan partai politik, kelompok kepentingan, media masa, dan lain-lain. Sehingga tidak ada gunanya, apabila ada hak tetapi tidak ada kebebasan.

Oleh karena itu, kebebasan warga negara salah satunya tertuang dalam hadirnya ruang publik, tempat dimana mereka dapat menyuarakan kepentingannya tanpa intervensi dari pihak manapun, termasuk negara. Demokrasi semakin dewasa semakin sehat, apabila negara bisa mengakses opini dari ruang publik ini. Menurut Reza A. Antonius, secara ideal, ruang publik juga sering dibayangkan sebagai ruang diskursif, dimana setiap orang

dan setiap kelompok dapat berkumpul untuk membicarakan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sehingga, bila mungkin, mereka bisa sampai pada keputusan yang bersama. Ruang publik dapat dipandang sebagai suatu bentuk teater raksasa di dalam masyarakat modern, dimana partisipasi politik di dorong melalui pembicaraan dan diskusi politik. Di dalam ruang publiklah opini publik yang sesungguhnya bisa dibentuk.<sup>5</sup>

Maka dewasa ini, demokrasi harus mencakup dimensi yang lebih luas lagi atas kesejahteraan rakyat, bukan hanya karena telah dilaksanakannya sebuah pemilu di suatu negara, lalu bisa dikatakan demokratis. Seperti dalam konsep *Rule of Law* menurut *International Commission of Jurists* yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, menyebutkan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis antara lain:

- 1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
- 2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*).
- 3) Pemilihan umum yang bebas.
- 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
- 5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.

---

<sup>5</sup> Dalam F. Budi Hardiman, *Ruang Publik Melacak "Partisipasi Demokrasi" dari Polis sampai Cyberspace*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm., 241-242.

6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).<sup>6</sup>

Pada poin ke 4 jelas bahwa kebebasan milik semua warga negara, bukan hanya warga negaranya pendukung kekuasaan, maka dari itu penjara hanya untuk orang yang kriminal dan bukan untuk orang yang memiliki pendapat berbeda. Sehingga perlunya mengembangkan corak demokrasi yang inklusif dan membuka akses bagi partisipasi warga negara. Ini artinya demokrasi itu harus memberi lebih ruang untuk diskusi-diskusi langsung dengan warganya. Bagaimana warga harus bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung/terbuka. Artinya bagaimana ruang-ruang publik harus lebih diperbanyak dan bagaimana antara politisi dengan masyarakat awam harusnya bersifat egaliter, setara, dan tidak ada yang lebih dominan.

Pertama-tama harus diperlihatkan, berkenaan dengan hak-hak dasar yang menjamin keefektifan ruang publik di wilayah politis (seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, dan kebebasan pers), bahwa dalam pengaplikasian hak-hak dasar di dalam kondisi faktual ruang publik yang bertransformasi secara struktural, tidak lagi bisa ditafsirkan hanya sebagai larangan belaka melainkan juga secara positif sebagai pelindung partisipasi seandainya hak-hak dasar tersebut memenuhi fungsi orisinal mereka dalam maknanya yang penuh.<sup>7</sup> Bagaimana mencapai itu? Pertama bahwa perlu ada ruang publik, sebuah ruang dimana pertukaran gagasan antara semua orang berlangsung didalamnya. Sebuah ruang yang harus bersih dari bentuk-bentuk

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm., 116.

<sup>7</sup> Jurgen Habermas, *Ruang Publik Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Borjuis*, terj., Yudi Santoso, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007, hlm., 315.

dominasi dan paksaan, semua yang hadir di dalam ruang tersebut adalah partisipan yang berkedudukan setara.

### 2.1.2 Konsep *The Theory of Communicative Action*

Komunikasi adalah titik tolak Habermas, dan itu menjadi fundamen dalam usaha mengatasi kemacetan Teori Kritis para pendahulunya. Sebagaimana pemikiran aliran Frankfurt pada umumnya, terutama sebagaimana kita temui dalam pemikiran Mark Khokheimer dan Adorno, Habermas juga melakukan kritik atas modernitas.<sup>8</sup> Paradigma yang lama, yang oleh Habermas disebut filsafat kesadaran dimana di dalamnya terkandung pemahaman tertentu tentang subjektivitas, yaitu subjek yang mengenali dan menguasai objeknya secara monologal. Dalam dialektik *der Aufklärung* Adorno dan Horkheimer mengkritik ciri-ciri rasio instrumental di dalam ilmu-ilmu sosial kemanusiaan dewasa ini dengan cara menyingkapkan hubungan timbal-balik antara mitos dan pencerahan, ideology dan kritik, mereka tetap terperangkap di dalam asumsi-asumsi filsafat kesadaran.<sup>9</sup> Semangat emansipasi atau semangat pembebasan filsafat pencerahan abad 15-18 telah digantikan oleh instruksi kontrol atas proses-proses yang di obyektifkan. Manusia tak lagi dianggap sebagai subyek, tetapi obyek yang dapat dimanipulasi secara teknis.

Poinnya adalah manusia tak lagi dianggap sebagai subyek, tetapi obyek yang dapat dimanipulasi secara teknis, bagaimana cermin dari kehidupan sekarang, dimana proses birokratisasi kehidupan itu hampir mengoptasi seluruh

---

<sup>8</sup> F. Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm., 9.

<sup>9</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm., 27.

sendi kehidupan kita. Birokratisasi kehidupan adalah segala sesuatu yang menghasilkan standarisasi. Birokratisasi kehidupan ini di istilahkan Habermas juga dengan cara interaksi atau cara komunikasi berupa *purposive-rational action*. *Purposive-rational action* atau rasionalisasi dalam tindakan instrumental, berarti pertumbuhan kekuatan-kekuatan produktif dan kontrol teknologis atas kehidupan sosial, birokratisasi, standarisasi, itu adalah contoh pertumbuhan kekuatan produktif dan kontrol teknologis atas kehidupan sosial. Tindakan yang rasional dengan maksud instrumental dibimbing oleh *technical rules* untuk *maximizing expected utilities*, mencapai *goal* melalui instrumen-instrumen yang tersedia, dan pemikiran Habermas mengenai *purposive-rational action* ini mirip dengan *zwekrational-Weber* atau rasional instrumentalnya Weber.<sup>10</sup>

Jadi, bagaimana kehidupan modern sekarang justru begitu dijiwai oleh rasionalitas instrumental, dan itu seringkali menimbulkan efek dehumanisasi. Dampaknya dapat berupa reifikasi atau kepalsuan, alienasi atau keterasingan totalitarian atau kesewenang-wenangan dan dominasi. Bagaimana setiap manusia dewasa ini dipaksa untuk memaksimalkan kemampuannya untuk menghasilkan target-target atau tujuan diluar dirinya. Maka dari itu *purposive rational action* harus di lawan dengan *communicative rational action* atau rasionalisasi dalam dimensi interaksi sosial.

Subjektivitas yang dicirikan dengan rasio komunikatif mempertahankan denaturasi-diri demi pertahanan-diri. Tidak seperti rasio instrumental, rasio komunikatif tidak dapat dimasukkan secara serampangan ke dalam

---

<sup>10</sup> Heru Nugroho, *Kritik Habermas terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan*, UNISIA No. 32/XVII/IV/1997, tahun 2016, hlm., 28.

pertahanan-diri. Rasio komunikatif tidak merujuk pada subjek yang menjaga dirinya dalam berhubungan dengan objek melalui representasi tindakan, ataupun pada sistem penjagaan-diri yang memisahkannya dari lingkungan, melainkan pada suatu tatanan dunia yang terstruktur secara simbolis yang terbentuk di dalam kegiatan menafsir para anggotanya dan hanya bisa di reproduksi melalui komunikasi. Dengan demikian rasio komunikatif tidak sekadar melawan subjek dan sistem yang telah dibuat sebelumnya; namun, dia ambil bagian dalam proses strukturisasi hal-hal yang harus di pertahankan. Perspektif utopis rekonsiliasi dan kebebasan sebenarnya berpegangan pada syarat-syarat sosiasi komunikatif individu; perspektif ini terbangun di dalam mekanisme linguistik reproduksi spesies.<sup>11</sup>

Tetapi sebetulnya, Habermas tidak menentang penerapan rasionalitas teknik atau *purposive rational action* dalam masyarakat. Tetapi setiap totalisasi rasional teknik dalam setiap aspek kehidupan perlu dihindarkan. Sehingga, *purposive rational action* itu tidak menjadi soal, kita memang memerlukan itu, misalkan dalam kerja birokrasi, universitas, perusahaan swasta dll semua membutuhkan itu. Tetapi, yang Habermas tidak setuju, adalah ketika *purposive rational action* ini mendominasi seluruh sendi kehidupan manusia. Sehingga yang diperlukan kemudian adalah komunikasi politik yang bebas dari dominasi.

Oleh sebab itu, teori kritik, lebih khusus teori tindakan komunikatif yang dikembangkan Jurgen Habermas menekankan tiga hal pokok: *Pertama*, dengan teori tindakan komunikatif sudah menjadi tujuan Habermas untuk menggulingkan individualisme monolog dari teori masyarakat liberal dan utilitarian. *Kedua*, gambaran Weber mengenai modernitas sebagai sebuah penjara yang secara sejarah tidak terelakkan dalam Sangkar Besi Kapitalisme lanjut haruslah diperbaiki, 'sangkar besi' yang bagi Weber berarti rasionalisasi

---

<sup>11</sup> Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif I Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*, terj., Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006, hlm., 489.



sebagai hilangnya kebebasan dan rasionalisasi sebagai hilangnya makna. *Ketiga*, tindakan komunikatif dan reproduksi masyarakat, “Proses pencapaian pemahaman bertujuan pada kesepakatan yang sesuai dengan kondisi persetujuan yang di motivasi secara rasional [*Zustimmung*] terhadap isi sebuah ujaran [pencapaian komunikatif] bersandar pada keyakinan bersama”.<sup>12</sup>

Dalam esainya, *Technology and Science as “Ideology”*, Habermas mengajukan sebuah hipotesis bahwa modernisasi kapitalis telah merasionalisasikan masyarakat dengan satu bentuk rasionalitas dominan, yang disebut oleh Weber *Zweckrationalitat* (rasionalitas tujuan) atau oleh Habermas “rasionalitas kognitif-instrumental”. Jenis rasionalitas ini, menurut Habermas, hanya cocok untuk mengembangkan kontrol teknis atas alam dan proses-proses yang diobjektifkan. Dengan kata lain, rasionalitas macam itu, jika diterapkan pada politik, hanya akan mewujudkan model teknokratis. Rasionalisasi dalam dimensi kerja ini, dalam arti usaha memanipulasi masyarakat sebagai proses-proses objektif, tidak cocok untuk interaksi sosial yang pada dasarnya berdimensi praktis dan intersubjektif. Yang dibutuhkan adalah rasionalisasi dalam dimensi komunikasi. Dalam dimensi ini, rasionalisasi kekuasaan didasarkan pada sebuah rasionalitas yang bukan kognitif instrumental. Dalam *The Theory of Communicative Action*, Habermas menyebutkan rasionalitas praktis-etis sebagai dasar rasionalisasi kekuasaan politis.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pusey, Michael, Habermas sebagaimana dikutip Muhamad Supraja, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm., 95-96.

<sup>13</sup> F Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm., 155-156.

Artinya, kegagalan sebelumnya itu dikarenakan paradigma interaksi yang digunakan oleh generasi pertama Mazhab Frankfurt, mereka menggunakan paradigma interaksi berupa paradigma dimensi kerja. Paradigma kerja itu adalah interaksi yang sifatnya satu arah, ada pihak dominan dan yang dikuasai, ada subjek dan objek, ada aktor serta figuran. Dalam aliran pertama misalnya, seolah Adorno, Khokheimer dan Marcuse itu sendirian mengolah teori, kemudian tiba-tiba dia memberikan teori itu kepada mahasiswa dan kelas pekerja, tanpa melibatkan mereka untuk mendiskusikan dan membuat teori bersama, dimana bentuk interaksi atau komunikasinya bersifat represif. Bagi Habermas, harusnya interaksi yang dikembangkan adalah paradigma komunikasi. Dalam rangka paradigma komunikasi, selalu sifatnya dialog atau dua arah, tidak pihak yang dominan dan yang dikuasai, tidak ada subyek-obyek serta tidak ada istilah aktor dan figuran. Komunikasi yang seperti ini sifatnya emansipatoris atau membebaskan. Jadi, apabila ingin melakukan perubahan sosial, maka menurut Habermas harus menciptakan komunikasi yang membebaskan.

Hanya model tindakan komunikatif yang mengandaikan bahasa sebagai media komunikasi bebas tekanan dimana pembicara dan pendengar, di luar konteks dunia-kehidupan yang telah diinterpretasikan sebelumnya, secara simultan merujuk kepada hal-hal di dalam dunia objektif, sosial dan subjektif dalam rangka menegosiasikan berbagai definisi-situasi umum. Konsep bahasa interpretif terdapat di dalam berbagai upaya untuk mengembangkan suatu

pragmatika formal.<sup>14</sup> Pencapaian pemahaman di dalam bahasa menurut Habermas mengandaikan adanya suatu kesepakatan yang di dorong oleh motivasi rasional di antara para partisipan dan dapat diukur berdasarkan klaim validitas yang dapat di kritik. Klaim-klaim validitas tersebut diantaranya kebenaran proposional, ketepatan normatif, dan kejujuran subjektif. Dimana ekspresi-ekspresi ini dapat dianalisis secara lebih cermat dengan dua cara, yaitu di satu sisi, mengacu pada berbagai bentuk penguatan klaim validitas yang dilakukan secara diskursif dan di sisi lain, dia mengacu pada relasi aktor komunikatif dengan dunia ketika mengemukakan klaim validitas untuk mengungkapkan pendapatnya.<sup>15</sup>

Menurut Habermas, tindakan antarmanusia atau interaksi sosial di dalam masyarakat tidak terjadi secara semena-mena, melainkan pada dasarnya bersifat rasional.<sup>16</sup> Karena yang dilakukan dalam komunikasi antara pembicara dengan pendengar atau sebaliknya akan melakukan validitas pemahaman satu sama lain. Tindakan komunikatif pada akhirnya bertujuan pada konsesus, jika para peserta komunikasi dapat menyatakan pendapat dan sikapnya terhadap klaim-klaim kesahihan tersebut secara bebas dan tanpa paksaan. Klaim-klaim kesahihan yaitu klaim-klaim bahwa pernyataan mereka itu benar, diantaranya menyangkut klaim kebenaran (dunia objektif/alam), klaim kejujuran (dunia subjektif/individu), dan klaim ketepatan (intersubjektif).<sup>17</sup> Jadi, apabila ketiga

---

<sup>14</sup> F. Schutze, Munich, sebagaimana dikutip Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif I*, Op. Cit., hlm., 123.

<sup>15</sup> Ibid., hlm, 96.

<sup>16</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, hlm., 34.

<sup>17</sup> Ibid., hlm., 37.

tersebut hidup, komunikasi yang terjadi akan produktif dan menghasilkan konsensus yang bagus pula.

Ketika kita mampu menciptakan paradigma komunikasi atau menciptakan komunikasi yang membebaskan, maka kita juga berhasil menciptakan *public sphere* atau ruang publik. Meminjam pengertian menurut Habermas, ruang publik adalah ruang yang bebas dari penindasan dimana setiap orang didalamnya ditempatkan secara egaliter atau setara, meraka bebas melangsungkan beragam tema diskusi bahkan tema *subversive* sekalipun. Tapi bagaimana manusia mengatasi dominasi yang ada dalam lingkungan sosial yang menjadi fokus kajian teori kritis? Disinilah menempatkan praksis dalam arti komunikasi. Kalau kita hendak menyelesaikan masalah sosial atau melakukan emansipasi, maka kita tidak boleh memahami praksis sebagai kerja, karena jika demikian kita hanya akan saling menaklukan satu sama lain dan menciptakan dominasi baru. Sehingga praksis sosial itu harus dilakukan lewat komunikasi atau bersifat komunikatif. Tujuan dari komunikasi adalah untuk menciptakan suatu konsesus atau kesepakatan yang bebas dominasi dan paksaan.

## **2.2 Mural; Media Kritik Pemerintah Melalui Seni**

Mural merupakan seni yang digambar pada dinding yang luas, meskipun pada awalnya hanya dianggap dapat mengotori pemandangan perkotaan, tetapi seiring perkembangan zaman, media tersebut mampu memunculkan ide-ide aspirasi warga negara dan bahkan mulai menjadikannya sebagai alat politik. Penggunaan seni mural untuk komunikasi publik akan memperlancar jalannya penguatan masyarakat karena di samping mural sebagai karya seni yang mengekspresikan realitas sosial-

politik sehari-hari juga menjadi rujukan berperilaku secara sosial bagi warga yang melihatnya, dalam konteks ini, karya seni bukan hanya merupakan ekspresi seniman tetapi juga menjadi rujukan para pemerhatinya. Contohnya, masyarakat secara bersama-sama dapat menyuarakan pendapatnya tentang suatu isu/apa yang dia rasakan yang kemudian diekspresikan kedalam mural dengan teknik-teknik seni sosial yang tentunya dikuasai oleh pelaku seni tersebut. Setelah mural tersebut terpampang di ruang publik yang strategis maka masyarakat yang lalu-lalang dan memperhatikan, baik secara sepintas maupun mendetail, dapat dengan cepat menangkap pesan pesan yang diutarakan perupanya.<sup>18</sup>

Oleh karenanya, mural mesti memperhatikan aspirasi publik sebab berada di ruang publik. Sehingga mural mampu untuk memperlancar komunikasi publik yang bebas dominasi, karena publik merupakan entitas majemuk yang menjadi penguat adanya demokrasi. Di dalam level-level pesan mural itu sendiri, misalnya ada unsur etika dan estetika yang menaungi sebuah karya. Ruang publik seperti dinding jalanan dipilih sebagai ekspresi representatif dari suara masyarakat kecil. Apabila semua kritik itu dianggap berupaya untuk pemberontakan atau mau menjatuhkan, betapa terlalu paranoidnya pemerintah tersebut. Berkaitan dengan fungsi mural sebagai instrumen komunikasi publik dalam hal menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya dalam bidang pemerintahan, maka pengetahuan politik bagi seniman mural sangat diperlukan, seperti pengetahuan mengenai politik keseharian, misalnya tentang pemahaman kondisi negara, masyarakat, pasar, dan kondisi

---

<sup>18</sup> I Wayan Setem, dkk., *Seni Mural sebagai Media Penyampaian Aspirasi Rakyat*, Jurnal Ilmiah Seni Rupa, nomor 1, vol, 10, tahun 2011, hlm., 63.

lingkungan sekitar.<sup>19</sup> Sejujurnya warga negara/publik mempunyai batas etis melakukan dengan baik-baik. Maka dari itu seniman akan tahu pasti waktu dia untuk ‘berteriak’ menyuarakan pendapatnya.

Dalam menyikapi penghapusan mural menyerupai wajah Presiden Jokowi yang bertuliskan *404 Not found* di Batu Ceper Kota Tangerang bahwa ada reaksi berlebihan dari para aparat yang kemudian serta merta menghapus atau melakukan tindakan-tindakan terhadap para seniman mural itu yang akhirnya dapat mempersepsikan bahwa rezim ini membatasi kebebasan berpendapat. Pesan komunikasi politik yang tersaji lewat mural lebih efektif, karena syarat akan nilai dan interpretasi. Penggunaan ruang publik sebagai wadah ekspresi mural menjadikan seni jalanan ini mudah dimengerti dan dicerna.

Dilihat dari sudut pandang sastrawan, Yoseph Yapi Taum mengatakan bahwa mural *404 Not Found* bergambar foto Presiden Jokowi merupakan sebuah ekspresi seni, sama seperti ekspresi sastra, yang diperlukan sebagai sarana pengembangan peradaban manusia. Teori-teori sosiologi sastra mempersoalkan kaitan antara karya sastra dan ‘kenyataan’. Studi-studi sosiologis terhadap sastra menghasilkan pandangan bahwa karya sastra dalam taraf tertentu merupakan ekspresi masyarakat dan bagian dari suatu masyarakat.<sup>20</sup> Dalam buku *History of English Literature* (1863) Hippolyte Taine menyebutkan bahwa sebuah karya sastra dapat dijelaskan menurut tiga faktor, yakni ras (mengacu pada ciri turun-temurun seperti perangai, bentuk tubuh, juga sifat-sifat suatu bangsa), saat/momen (ialah suatu sosial-politik

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm., 64.

<sup>20</sup> Dalam Yesmil Anwar, Adang, *Sosiologi untuk Universitas*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm., 367.

pada suatu periode tertentu), dan lingkungan (meliputi keadaan alam, iklim, dan sosial).<sup>21</sup>

Dalam proses pembuatan mural, untuk mendapat pemahaman yang mudah dari masyarakat, seniman mural menyisipkan beberapa simbol tertentu pada gambar mural. Lebih banyak seniman mural menyisipkan beberapa kata untuk mendukung pemahaman publik. Seperti yang dijelaskan oleh Roland Barthes bahasa merupakan sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi dari suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Begitu halnya dengan mural bagi pemaknaan setiap individu tentunya berbeda-beda. Kehadiran mural di ruang publik tentunya dibarengi dengan adanya ribuan pesan dan makna yang ditujukan kepada masyarakat.<sup>22</sup>

Menurut Taine, sastra bukanlah sekedar permainan imajinasi yang pribadi sifatnya, tetapi merupakan rekaman tata cara zamannya, suatu perwujudan macam pikiran tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan antara sastra yang diciptakan pengarang (melalui imajinasi dan pemahamannya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakatnya) dengan norma-norma dan nalar kolektif masyarakat tempat pengarang hidup.<sup>23</sup> Maka dari itu, karya seni tidak pernah memiliki tafsir tunggal. Seperti mural yang bertuliskan 404 Not Found, kita belum mengetahui apakah hal tersebut sebagai pengangkatan isu sosial atau kritikan yang hendak disampaikan oleh pembuat mural tersebut dengan tujuan agar masyarakat juga mengetahui isu sosial yang sedang terjadi, atau bahkan hanya sebatas ekspresi seni si pembuat mural. Aparat yang menganggap secara sepihak mural tersebut

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm., 370.

<sup>22</sup> Ni Made Yuliarmini, dkk., *Kritik Sosial Komunitas Djamur Melalui Mural di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT), 1 (1), 2020, hlm., 7-8.

<sup>23</sup> Yesmil Anwar, Op. Cit., hlm., 374.

sebagai kritik dan penghinaan kepada Presiden sebagai lambang negara merupakan hal yang berlebihan, terlebih aparat belum mengetahui alasan pembuat mural tersebut.

Dalam hal ini tidak cukup hanya menyatakan bahwa seni terancam oleh kekuasaan suatu negara. Jika benar demikian, soalnya menjadi sederhana: seniman harus berontak atau menyerah. Tugasnya, jika dihadapkan pada penindasan, adalah membuka penjara dan menyuarkan penderitaan dan kebahagiaan semua orang. Di sinilah seni membuktikan diri di hadapan mereka yang memusuhinya bahwa ia bukan musuh siapa pun. Seni demi seni sendiri barangkali tidak mampu menghasilkan suatu *renaisans* yang melahirkan keadilan dan keabsahan. Tetapi tanpa keduanya, *renaisans* tidak akan punya bentuk dan tidak ada apa-apanya. Tanpa budaya, dan kebebasan nisbi timbul karenanya, masyarakat yang paling sempurna pun akan menyerupai rimba belantara. Inilah alasannya mengapa setiap ciptaan yang otentik adalah hadiah bagi masa depan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Albert Camus, *Krisis Kebebasan*, terj., Edhi Martono, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017, hlm., 76-77, hlm., 80.



Mural sebelum *viral* di twitter:



*Gambar 1 - Mural sebelum viral di twitter*

sumber: detikNews

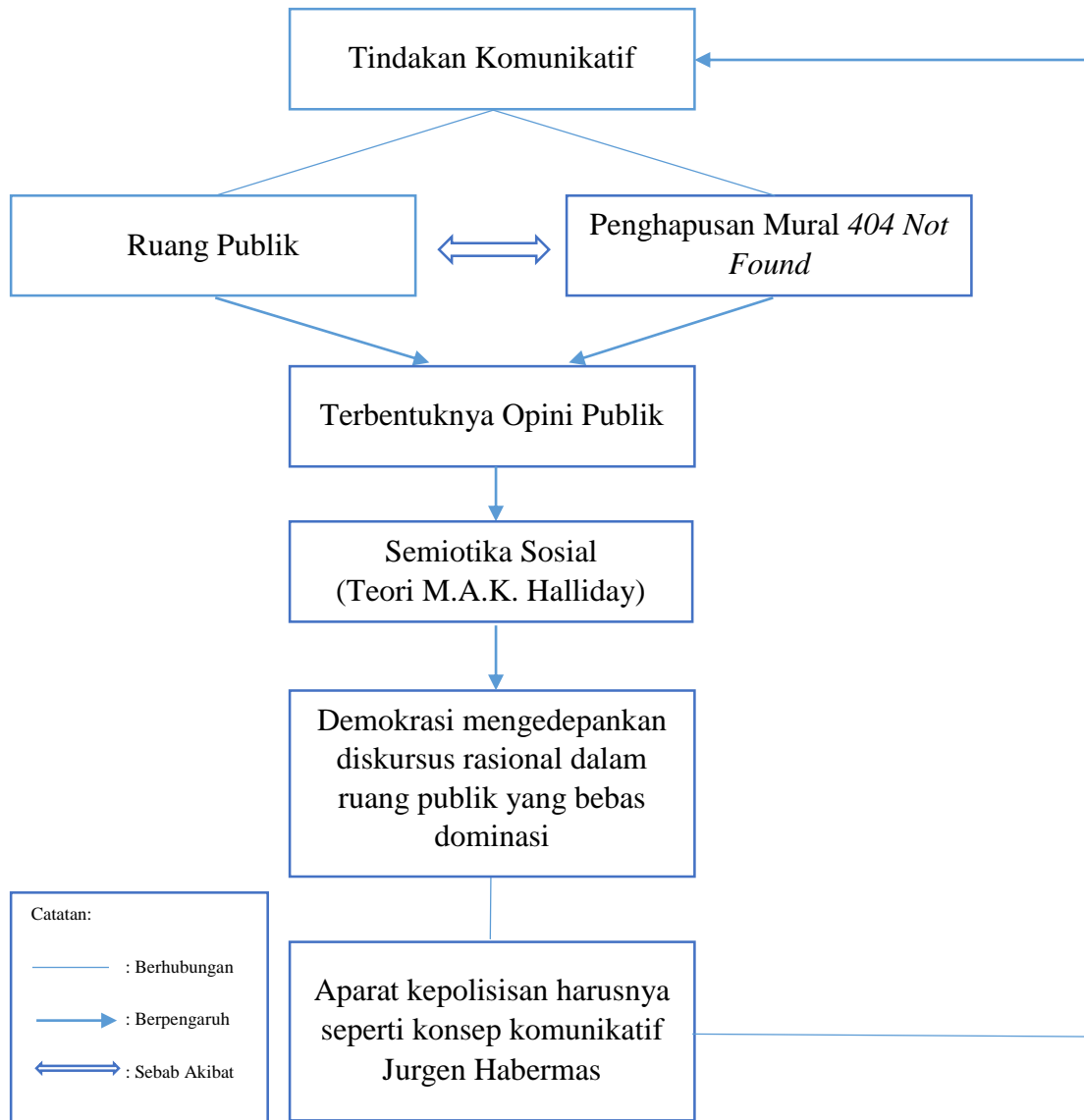
Mural setelah *viral* dan dihapus oleh aparat setempat:



*Gambar 2 - Mural setelah viral*

sumber: TribunJakarta.com/Ega Alfreda

### 2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 3 - Kerangka pemikiran

Lukisan mural viral dengan gambar wajah Presiden RI Joko Widodo, yang bertuliskan *404 Not Found* kini sudah dihapus. Lukisan mural itu berada di dinding kolom kereta bandara, tepatnya di Jl. Pembangunan 1, Kelurahan Batu Jaya, Kecamatan Batu Ceper. Warga yang tinggal di sekitar lokasi mengungkapkan bahwasanya mural tersebut sudah lama dibuat oleh warga sekitar awal tahun 2021 lalu. Namun setelah *viral*, mural tersebut dihapus oleh petugas keamanan setempat

pada Jum'at 13 Agustus 2021 karena dianggap telah menghina Presiden sebagai simbol negara dan melanggar tata tertib, sehingga menimbulkan banyak kontradiksi antara masyarakat dengan pemerintah. Pasalnya di negara demokrasi, hal tersebut dianggap sebagai kebebasan berpendapat di ruang publik. Sedangkan mural itu hadir dan dianggap sebagai kritik, maka kebebasan bersuara terbatas, karena lukisan pun di bungkam kebebasannya.

Sering terjadi paradoks antara kebebasan dan hukum, dimana kebebasan ini bisa terealisasi pada hukum yang rasional. Bagaimana cara kita mengukur substansi demokrasi di Indonesia? Untuk kemudian penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi melalui opini publik yang tercantum dalam pemberitaan yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori semiotika sosialnya M.A.K. Halliday. Hasil dari analisis tersebut akan memperlihatkan ruang publik yang sedang berlangsung dalam studi demokrasi. Setelah itu membangun kesimpulan yang menghubungkan antara realitas dengan paradigma tindakan komunikatif Jurgen Habermas sebagai pisau analisis.